

REFERENSI BUKU-BUKU HUKUM

No.	Nomor Buku	Judul Buku	Penulis/Pengarang	Tahun	Ringkasan
1	2.01-1. 00 . 00072	Menelusuri Akar Krisis Indonesia	Christianto Wibisono	1999	Menjelaskan mengenai penyebab krisis yang terjadi di Indonesia yang bukan semata-mata karena jatuhnya nilai tukar rupiah namun telah ada sejak lama dan berkembang karena proteksi penguasa.
2	2.01-1. 00 . 00073	Menggugat Masa Lalu, Menggagas Masa Depan Ekonomi Indonesia	Disunting oleh St. Sularto	2000	Membahas mengenai perekonomian Indonesia menjelang 100 hari pemerintahan Gus Dur - Megawati, laporan Kompas mengenai Diskusi Panel Ahli Ekonomi Kompas Ke-29 tanggal 15 Juli dan 16 Juli 1999 dan Diskusi Perekonomian Indonesia, Kompas bekerja sama dengan Ikatan Alumni UI Fakultas Ekonomi (Iluni UI-FE) tanggal 28 dan 29 Oktober 1999, serta mengenai perekonomian Indonesia Pasca-Pemilu 1999.
3	2.01-1. 00 . 00077	Etika Profesi Hukum	Suhrawardi K. Lubis S.H.	2000	Membahas mengenai profesi hukum, ukuran baik dan buruk, keadilan, serta hak asasi.
4	2.01-1. 00 . 00085	Teori dan Strategi Pembangunan Nasional	Prof. H. Bintoro Tjokroamidjojo dan Drs. Mustopadidjaja A.R.	1990	Menguraikan telaah beberapa pemikiran mengenai Pembangunan Nasional, baik yang menyangkut perkembangan teori maupun strategi serta implikasi perkembangan pemikiran tentang teori maupun strategi pembangunan nasional yang mendasari pola umum kebijaksanaan pembangunan nasional di Indonesia. Struktur pembahasan dimulai dari Proses Pembangunan Nasional, Hubungan Teori dan Strategi dalam Pembangunan Nasional, Perkembangan Pemikiran Tentang Teori Pembangunan Nasional, Perkembangan Pemikiran Tentang Strategi Pembangunan Nasional, serta Masalah-Masalah, Kerangka Pendekatan dan Pola Umum Pembangunan Indonesia.
5	2.01-1. 00 . 00109	Diagnosa Ekonomi dan Kebijakan Publik	Didik J. Rachbini	1999	Menjelaskan mengenai diagnosa persoalan-persoalan ekonomi dan kebijakan publik yang terjadi.
6	2.01-1. 01 . 00128	Moral Lingkungan Hidup	Dr. William Chang, OFMCap	2001	Pemikiran mengenai etika lingkungan hidup
7	2.01-1. 01 . 00142	Pedoman Kelembagaan dan Usaha Pengusaha Kecil Menengah	Kantor Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah	2000	Menjelaskan mengenai Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah R.I. Nomor 21/KEP/MENEG/VII/2000. Juga menjelaskan mengenai kelembagaan, usaha, pemberdayaan pengusaha kecil menengah, dan koordinasi pemberdayaan PKM

8	2.01-1. 01 . 00191	Otopsi Kejahatan Bisnis	Robintan Sulaiman, S.H., M.H., M.A., M.M.	2001	Merupakan ramuan tulisan baik yang diterbitkan media cetak, buku-buku, kliping koran, tulisan-tulisan para pakar dan pemerhati serta sumber lainnya. Membahas mengenai wajah bisnis di Indonesia dalam pengaruh Krisis Ekonomi, kejahatan persaingan curang dan usaha tidak sehat, kejahatan perbankan oleh bank (<i>crimes by the bank</i>), kejahatan pasar modal, kejahatan <i>money laundering</i> , kejahatan komputer dan <i>cyber crime</i> , tindak pidana korupsi, kejahatan asuransi, kejahatan uang palsu, kejahatan HAKI (Hak Milik Kekayaan Intelektual), kejahatan terhadap konsumen, serta kejahatan penyelewengan BLBI dan BMPK.
9	2.01-1. 01 . 00381	Prinsip Keuangan Negara	Tim Penyusun Rancangan Undang- Undang Ketentuan Pokok Keuangan Negara	2001	Memberikan penjelasan mengenai landasan pemikiran dan prinsip-prinsip yang dituangkan dalam tiga RUU yaitu RUU Keuangan Negara, RUU Perbendaharaan Negara, dan RUU Pemeriksaan Tanggung Jawab Keuangan Negara oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
10	2.01-1. 02 . 00098	Profesionalisme Versus Politik Tantri Abeng Menjawab	Akbar Faizal	2002	Menjelaskan mengenai BUMN dari kacamata Tantri Abeng berdasarkan pengalamannya dalam menerapkan platform pengelolaan dan pengembangan BUMN lewat blueprint dengan tiga konsep dasar yakni restrukturisasi, profitisasi, privatisasi serta reaksi para politisi terhadapnya pada saat itu, disajikan dalam bentuk tanya jawab.
11	2.01-1. 02 . 00370	Pengembangan Sumber Daya Manusia Penyelenggara Otonomi Daerah	Drs. Marsono	2002	Merupakan informasi tentang Pendidikan dan Pelatihan Peawai Negeri Sipil yang memuat antara lain mengenai pembinaan otonomi daerah, komponen diklat, latihan prajabatan, sekolah staf dan pimpinan administrasi, pendidikan dan pelatihan struktural staf dan pimpinan administrasi, pendidikan dan pelatihan jabatan kepemimpinan pegawai negeri sipil, pendidikan dan pelatihan teknis fungsional umum, pendidikan dan pelatihan kader pemerintahan dalam negeri, pendidikan dan pelatihan pegawai pemerintahan dalam negeri, serta pendidikan dan pelatihan polisi pamong praja.
12	2.01-1. 03 . 00036	76 Kasus Perpajakan dan Solusinya	Rustam Budiman	2001	Kumpulan tanya jawab mengenai perpajakan yang memberikan gambaran secara umum tentang masalah perpajakan praktis yang ditemui sehari-hari oleh berbagai wajib pajak disertai alternatif solusi praktis untuk mengatasi masalah-masalah tersebut.

13	2.01-1. 03 . 00052	Restrukturisasi Perbankan dan Dunia Usaha	Drs. H. Masyhud Ali, MBA, MM	2002	Mengulas masalah perbankan sejak deregulasi sampai rekapitalisasi perbankan sebagai kebijakan terakhir.
14	2.01-1. 03 . 00070	Usaha Perbankan dalam Perspektif Hukum	Dr. Gunarto Suhardi, S.H.	2003	Analisi dari sudut pandang Ilmu Hukum atas beberapa permasalahan perbankan dalam kaitannya dengan perkembangan kegiatan ekonomi dan perkembangan reksa pemerintahan di Indonesia. Membahas kondisi lingkungan usaha perbankan, persyaratan yuridis untuk mendirikan bank, fungsi perbankan yang sehat di sisi pasiva dan aktiva, usaha devisa, pengelolaan likuiditas, usaha-usaha melindungi depositan, pengawasan perbankan oleh otoritas moneter, pertanggungjawaban manajemen dan pemilik bank, proses penyelesaian bank bermasalah, dan uraian tentang usaha perbankan di masa depan.
15	2.01-1. 03 . 00076	Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi	Dr. Gunarto Suhardi, S.H.	2002	Menjelaskan mengenai peranan hukum dalam pembangunan ekonomi Indonesia dan membahas antara lain berbagai teori hukum yang berperan dengan kegiatan ekonomi, sejauh mana hukum harus berperan dalam pembangunan ekonomi, pengertian pengaruh hukum, peranan nyata dari pemerintah, serta langkah-langkah koreksi utama.
16	2.01-1. 03 . 00115	Privatisasi di Indonesia, Teori dan Implementasi	Indra Bastian, Ph.D., MBA, Akt.	2002	Pengkajian mendalam dan pembahasan isu privatisasi secara komprehensif terutama dalam implementasi privatisasi di Indonesia.
17	2.01-1. 03 . 00117	Indonesia Pasca Soeharto	Geoff Forrester	2002	Pemaparan secara jelas bagaimana Amin Rais mampu meyakinkan kalangan mahasiswa, politisi sipil, serta para penentu kebijakan militer bahwa kunci permasalahan multidimensional Indonesia adalah menurunkan Soeharto dari kursi presiden, pembeberan perilaku para pengambil kebijakan nasional pada masa itu dan situasi Indonesia setelah menumbangkan Soeharto.
18	2.01-1. 03 . 00369	Panduan dalam Memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia	MPR-RI	2003	Merupakan panduan dalam memasyarakatkan UUD 1945 dan perubahannya.
19	2.01-2. 04 . 00011	Desentralisasi Fiskal di Negara-Negara Berkembang	Richard M. Bird dan Francois Vaillancourt	2000	Memaparkan hasil studi terkini, memantau kemajuan-kemajuan, permasalahan-permasalahan, dan potensi-potensi desentralisasi fiskal di berbagai kelompok negara berkembang baik di negara federal maupun negara kesatuan termasuk Indonesia, menjelaskan syarat-syarat apa saja yang mendukung suksesnya desentralisasi fiskal terlepas dari keseimbangan makro atau efisiensi mikro.

20	2.02-2. 04 . 00011	Desentralisasi Fiskal di Negara-Negara Berkembang	Richard M. Bird dan Francois Vaillancourt	2000	Memaparkan hasil studi terkini, memantau kemajuan-kemajuan, permasalahan-permasalahan, dan potensi-potensi desentralisasi fiskal di berbagai kelompok negara berkembang baik di negara federal maupun negara kesatuan termasuk Indonesia, menjelaskan syarat-syarat apa saja yang mendukung suksesnya desentralisasi fiskal terlepas dari keseimbangan makro atau efisiensi mikro.
21	2.01-1. 04 . 00029	Proses Tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi dalam Hukum Pidana	Leden Marpaung, S.H.	1997	Membahas mengenai pengertian ganti kerugian dan melanggar hukum, ganti kerugian karena perbuatan aparat penegak hukum, ganti kerugian karena perbuatan terdakwa, yurisprudensi gugatan ganti kerugian, dan rehabilitasi. Dilengkapi dengan gambaran keadaan.
22	2.01-1. 04 . 00030	Tuntutan Uang Paksa (Dwangsom) dalam Teori dan Praktik	Lilik Mulyadi, S.H., M.H.	2002	Menjelaskan dimensi, seluk beluk, dan ruang lingkup tentang lembaga uang paksa (dwangsom/astreinte) baik secara teoritik (Pasal 606a dan 606b Rv Indonesia) dan praktik peradilan serta membandingkan ketentuan uang paksa dalam pasal 606a-I Rv Belanda.
23	2.01-1. 04 . 00031	Teori dan Hukum Konstitusi	Dr. H. Dahlan Tahib, S.H., M.Si., Jazim Hamidi, S.H., M.H., dan Hj. Ni'matul Huda, S.H., m.Hum.	2003	Membahas teori-teori dan hukum yang berkaitan dengan konstitusi secara komprehensif dan disusun secara sistematis. Dilengkapi analisis yuridis terhadap beberapa masalah ketatanegaraan kontemporer di Indonesia.
24	2.01-1. 04 . 00032	Modern Governments and Constitutions, Volume I	N. Jayapalan	2002	Merupakan penjelasan teori, prinsip-prinsip, dan klasifikasi dari konstitusi beberapa negara antara lain konstitusi Inggris, Amerika, Perancis, dan Swiss.
25	2.01-1. 04 . 00033	Modern Governments and Constitutions, Volume II	N. Jayapalan	2002	Merupakan penjelasan teori, prinsip-prinsip, dan klasifikasi dari konstitusi beberapa negara antara lain konstitusi Cina, Jepang, Kanada, dan India.
26	2.01-1. 04 . 00039	Memahami Konsep Corporate Governance	Iman Sjahputra Tunggal, S.H., LL.M., C.N. dan Drs Amin Widjaja Tunggal, Ak., M.B.A.	2002	Merupakan tanya jawab mengenai <i>Good Corporate Governance</i> dan prinsip-prinsip di dalamnya.
27	2.01-1. 04 . 00051	Panitera Pengadilan, Tugas, Fungsi dan Tanggungjawab	Drs. Wildan Suyuthi Mustofa, S.H., M.H.	2002	Menjelaskan mengenai Kekuasaan Kehakiman dan Badan Peradilan, Kepaniteraan Peradilan, Administrasi Peradilan, Pola Administrasi Kepaniteraan (Pola BINDALMIN), Pola BINDALMIN Kepaniteraan Peradilan Umum, serta Pola BINDALMIN Kepaniteraan Peradilan Agama.

28	2.01-1. 04 . 00061	Aspek Legal Kredit Sindikasi	Herlina Suyati Bachtiar, S.H., MBA	2002	Membahas mengenai perkembangan dan proses kredit sindikasi, istilah-istilah yang dipergunakan dalam kredit sindikasi, lead manager, mandat dan info memo, proses kerja kredit sindikasi, serta aspek legal dan dokumentasi dalam sindikasi.
29	2.01-1. 04 . 00065	Pemecahan Permasalahan Acara Perdata Peradilan Agama	Drs. H. Wildan Suyuthi Mustofa, S.H., M.H.	2002	Mencakup tiga komponen yaitu bahasan tentang sekitar Peradilan Agama, tanya jawab masalah peradilan agama, pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama yang dilengkapi dengan peraturan-peraturan terkait. Materi disajikan dengan menggabungkan antara teori dan praktek dan diberikan menurut proses beracara perdata di muka Peradilan Agama.
30	2.01-2. 04 . 00075	Fidusia, Penggadaian Diam-Diam dan Retensi Milik Menurut Hukum yang Sekarang dan Yang Akan Datang	Prof. MR. O.K. Brahn, Penerjemah: Linus Doludjawa	2001	Membahas mengenai Fidusia benda bergerak, gadai diam-diam benda bergerak menurut hukum yang akan datang, fidusia piutang atas nama, penggadaian diam-diam piutang atas nama menurut hukum yang akan datang, serta retensi milik menurut hukum sekarang dan hukum yang akan datang
31	2.02-2. 04 . 00075	Fidusia, Penggadaian Diam-Diam dan Retensi Milik Menurut Hukum yang Sekarang dan Yang Akan Datang	Prof. MR. O.K. Brahn, Penerjemah: Linus Doludjawa	2001	Membahas mengenai Fidusia benda bergerak, gadai diam-diam benda bergerak menurut hukum yang akan datang, fidusia piutang atas nama, penggadaian diam-diam piutang atas nama menurut hukum yang akan datang, serta retensi milik menurut hukum sekarang dan hukum yang akan datang
32	2.01-1. 04 . 00080	Perekonomian Indonesia Tahun 2004: Prospek dan Kebijakan	BAPPENAS	2003	Merupakan hasil studi yang melandasi penyusunan Kerangka Ekonomi Makro Rencana Pembangunan Tahunan (Repeta) 2004 yang kemudian diperbaharui berdasarkan kemajuan hingga bulan November 2003 serta tantangan pokok yang akan dihadapi pada tahun 2004.
33	2.01-1. 04 . 00081	Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia	Drs. Josef Riwu Kaho, MPA.	2002	Menguraikan tentang pengertian-pengertian pokok dan perkembangan desentralisasi di Indonesia, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan otonomi daerah yang mencakup faktor manusia, faktor keuangan, faktor peralatan, serta faktor organisasi dan manajemen.

34	2.01-1. 04 . 00083	Hubungan Pusat - Daerah dalam Pembangunan	Colin MacAndrews dan Ichlasul Amal	2003	Merupakan hasil penelitian para pakar dalam berbagai bidang dalam menentukan isu kunci yang merupakan dikotomi antara kekuasaan pusat dan pembangunan daerah. Yang dibahas antara lain adalah mengenai tinjauan umum pemerintah pusat dan pembangunan daerah, struktur pemerintahan di Indonesia, pelaksanaan dan hambatan dalam meningkatkan kemampuan pemerintah, upaya-upaya untuk mendesentralisasikan kebijaksanaan perpajakan, dimensi politik hubungan pusat - daerah Sumatera Barat dan Sulawesi Selatan, serta transmigrasi yang merupakan dampak regional keberhasilan pembangunan.
35	2.01-1. 04 . 00094	Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia	Prof. Dr. Moh. Mahfud M.D., S.H., S.U.	2001	Memberikan penjelasan mengenai Dasar Negara yang mencakup penjelasan mengenai polemik hubungan antara negara dan agama, sidang BPUPKI dan pengesahan oleh PPKI, serta perkembangan rumusan dasar negara. Selain itu juga membahas mengenai segi-segi ketatanegaraan yang mencakup penjelasan mengenai arti dan lingkup hukum tata negara, konstitusi sebagai unsur pokok hukum tata negara, dasar dan sistem pemerintahan di Indonesia, lembaga-lembaga negara, hak-hak asasi manusia sebagai unsur konstitusi, hak asasi manusia di Indonesia,serta perubahan Undang-Undang dasar.
36	2.01-1. 04 . 00100	Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah	Gatot Supramono, S.H.	1998	Membahas tentang hubungan luar nikah yang ditinjau dari segi hukum perdata, hukum pidana, dan hukum adat.
37	2.01-1. 04 . 00102	Kompilasi Hukum Telematika	Edmon Makarim, S.H., S.Kom.	2003	Menjelaskan mengenai kerangka kajian hukum yang berhubungan dengan telematika antara lain mengenai tinjauan umum informasi dan komunikasi, sekilas perkembangan teknologi sistem informasi dan komunikasi, kajian aspek hukum telekomunikasi, kajian aspek hukum perlindungan data dan hak pribadi, aspek hukum media di internet, kajian aspek hukum kearsipan dan dokumentasi perusahaan, kajian aspek hukum perikatan, kajian aspek hukum kekayaan intelektual, perlindungan konsumen, kajian aspek pidana, kajian aspek pembuktian pidana, kajian aspek perpajakan dan hukum internasional, kajian aspek peranan pemerintah dan kebijakan publik, kajian aspek asuransi, kajian aspek hukum persaingan perusahaan, serta standar pemeriksaan hukum untuk sistem informasi.

38	2.01-1. 04 . 00103	Pancasila dan UUD '45 dalam Paradigma Reformasi	H. Subandi Al Marsudi, S.H., M.H.	2003	Menjelaskan mengenai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara RI, latar belakang sejarah proses perumusan dan pengesahan Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia, Pancasila sebagai ideologi nasional, demokrasi Pancasila, hak-hak dan kewajiban-kewajiban, paham integralistik/kekeluargaan Indonesia, serta Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahannya.
39	2.01-1. 04 . 00114	Landasan dan Teknik Perundang-Undangan	Prof. Dr. M. Solly Lubis, S.H.	1995	Bahan pengetahuan dasar mengenai landasan-landasan dan teknik perundang-undangan, pola umum perundang-undangan (<i>legislative drafting</i>) sebagai bagian dari <i>legal drafting</i> berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum dan kebiasaan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
40	2.01-1. 04 . 00123	Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri	Yuswar Zainul Basri dan	2003	Memaparkan tentang keuangan negara secara lengkap dan berbagai perangkat untuk menganalisa kebijakan keuangan. Pemaparan dimulai dari definisi keuangan negara, keuangan negara dalam pembangunan ekonomi dan kaitannya dengan kebijakan keuangan negara serta APBN yang dilengkapi dengan topik peran perpajakan dalam pembangunan ekonomi serta hubungan antara keuangan negara dan keuangan daerah. Analisa kebijakan pengelolaan keuangan difokuskan kepada kebijakan utang luar negeri dan kaitannya dengan investasi dan pertumbuhan ekonomi.
41	2.01-1. 04 . 00139	Otonomi Daerah dan Daerah Otonom	Prof. Drs. HAW. Widjaja	2002	Menjelaskan mengenai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang pembicaraan pokoknya antara lain mengenai kewenangan dan kelembagaan, pengaturan personil, pelayanan daerah, pengaturan aset, perimbangan pusat dan daerah, dan lain sebagainya.
42	2.01-1. 04 . 00153	Cyber Crimes and Law	V.D. Dudeja	2002	Membahas mengenai <i>Cyber Crimes</i> /kejahatan dunia maya dan <i>Cyber Law</i>
43	2.01-1. 04 . 00162	Corporate Law, Second Series	William W. Bratton	2000	Membahas mengenai tema dan isu terbaru mengenai hukum perusahaan yang difokuskan pada hukum perusahaan dan ekonomi. Teori yang digunakan dibagi atas dua subyek yaitu paradigma ekonomi yang digunakan dan posisi pemegang saham/pemilik perusahaan dalam deskripsi perusahaan dan aturan tentang pemegang saham/pemilik perusahaan dalam regulasi hukum perusahaan.

44	2.01-1. 04 . 00166	Cyber Crimes (Perspektif E-Commerce Crime)	Robintan Sulaiman, S.H., M.H., M.A., M.M.	2001	Memberikan panduan mengenai perkembangan teknologi <i>cyber</i> dan informasi untuk membuka cakrawala agar tidak terjebak dan dapat mengantisipasi kejahatan bisnis <i>cyber</i> yang sangat canggih.
45	2.01-1. 04 . 00407	Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara	Zairin Harahap	2002	Seluk beluk Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara
46	2.01-1. 05 . 00082	Bunga Rampai Makalah Hukum Acara Perdata	Mahkamah Agung RI 2005	2005	Berisi Kumpulan makalah acara perdata yang disampaikan dalam pelatihan-pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh Pusdiklat MA-RI
47	2.01-1. 06 . 00037	Surat Berharga, Alat Pembayaran Dalam Masyarakat Modern	Imam Prayogo Suryohadibroto, S.H. dan Djoko Prakoso, S.H.	1995	Surat-surat berharga yang mudah diperdagangkan, yang mempunyai nilai tertentu yang dapat dialihkan dari satu tangan ke tangan yang lain dan mempunyai berbagai sifat khusus disebut dengan istilah <i>effecten</i> . <i>Effecten</i> termasuk diantaranya : Saham perseroan terbatas, obligasi, konosemen, wesel, aksep atau promis, cheque dan lain sebagainya. Dalam hukum, fungsi pokok dari <i>effecten</i> pada umumnya adalah sebagai alat pembuktian dalam hal terjadi perselisihan. Selain itu juga sebagai alat legitimasi bahwa pemegang surat berharga tersebut dianggap sebagai orang yang dapat melaksanakan atau mempunyai hak tertentu sehingga disebut juga sebagai surat-surat legitimasi (<i>legitimatiepapieren</i>).
48	2.01-1. 06 . 00043	Hukum Pertambangan Indonesia	H. Salim HS., S.H., M.S.	2006	Mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertambangan dan menganalisis berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan di Indonesia, disertai dengan kajian sosio-yuridis terhadap program pengembangan masyarakat lingkungan tambang berdasarkan studi pada PT. Newmont Nusa Tenggara.
49	2.01-1. 06 . 00045	Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara, dan Hukum Pidana	Prof. DR. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H.	2006	Peranan hukum pidana sebagai solusi minimalisasi permasalahan korupsi dengan tindakan implementatif kecenderungan prinsip ajaran <i>Materiele Wederrechtelijk</i> ke arah fungsi positif (pidanaaan), meskipun dilakuka secara limutatif dan kasusistis sifatnya. Pembalikan beban pembuktian dalam delik gratifikasi merupakan salah satu sarana menghidupkan aturan suap dalam tindak pidana korupsi. Persoalan <i>overheidsbeleid</i> masih menjadi <i>greyarea</i> terhadap soal kompetensi peradilan tindak pidana korupsi.
50	2.01-1. 06 . 00063	Membasmi Korupsi	Robert Klitgaard	2005	Menjelaskan bahwa korupsi itu bisa dilawan lewat 5 studi kasus konkret di Filipina, Hongkong, Singapura, Korea, dan Ruritania, dan desain sebuah kebijakan anti korupsi menurut Robert Klitgaard.

51	2.01-1. 06 . 00069	Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara	Prof. DR. Jimly Asshiddiqie, S.H.	2006	Membahas sengketa kewenangan antar lembaga negara yang menurut UUD 1945 penyelesaiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.
52	2.01-1. 06 . 00079	Analisis Kebijakan Publik	Edi Suharto, PhD	2005	Menyajikan Konsepsi, Komteks dan sekaligus framework Pengkajian kebijakan Sosial sebagai masalah satu cabang kebijakan publik, juga pengkajian isu-isu sosial, serta menekankan pada bagaimana melakukan analisis kebijakan publik, serta menyajikan model, kerangka analisis, petunjuk praktis melakukan analisis kebijakan beserta latihan-latihan yang terkait dengannya
53	2.01-1. 06 . 00108	Hukum Keuangan Negara	W. Riawan Tjandra	2006	Menyajikan secara komprehensif sisi-sisi penting pembaruan dalam prinsip dan tata kelola keuangan negara, dengan pendekatan multi disiplin dan perspektif keuangan negara ditelaah secara lengkap. Serta analisis keuangan daerah melalui metode transfer fiskal ke daerah, dalam rangka menyeimbangkan kapasitas fiskal pusat dan daerah.
54	2.01-1. 06 . 00127	Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum	Prof. DR. Baharuddin Lopa S.H.	2002	Membahas mengenai Kejahatan dan Perubahan Sosial, Mencegah Kejahatan Kerah Putih, Korupsi sebagai sumber kerawanan, pemunculan keadilan dari kasus Soeharto, Menegakkan hukum, serta Hakikat HAM: Keseimbangan.
55	2.01-1. 06 . 00135	Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank	Sutarno, S.H., M.M.	2005	Membahas aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan proses pemberian kredit yang diawali analisa permohonan kredit, penyusunan perjanjian kredit, pengikatan jaminan, restrukturisasi kredit, dan tindakan penyelamatan dan penyelesaian kredit secara <i>internal bank</i> atau melalui tindakan hukum (<i>legal action</i>) melalui lembaga-lembaga hukum Indonesia.
56	2.01-1. 06 . 00140	KUP, Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan	Muhammad Rusjdi	2004	Rangkuman Undang-Undang dan ketentuan pelaksanaan yang disusun sesuai dengan masalah-masalah yang terkait.
57	2.01-1. 06 . 00144	Asset Securitization (Pelaksanaan SMF di Indonesia)	Gunawan Widjaja dan E. Paramitha Sapardan	2006	Menjelaskan mengenai gambaran konkret <i>Secondary Mortgage Facility</i> (SMF) dengan segala aspek yuridisnya, permasalahan seputar SMF, serta kemungkinan pelaksanaan sekuritas aset di Indonesia dalam bentuk SMF.

58	2.01-1. 06 . 00146	Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya	S.R. Sianturi, S.H.	1983	Menjelaskan materi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dibagi dalam tiga kelompok besar yaitu tindak pidana terhadap Negara, tindak pidana terhadap masyarakat, dan tindak pidana terhadap pribadi yang dibahas secara mendalam. Mencakup juga perubahan Undang-Undang yang mempunyai dampak terhadap teks pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang kemudian dimasukkan ke dalam pasal-pasal yang bersangkutan sehingga rumusan pasal-pasal yang ada adalah yang terbaru.
59	2.01-1. 06 . 00149	Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum dalam Ekonomi)	Drs. C.S.T. Kansil, S.H. dan Christine S.T. Kansil, S.H.	1996	Membahas mengenai inti pengetahuan hukum perusahaan, perseroan terbatas tahun 1995, hukum perbankan dewasa ini, izin usaha perindustrian, wajib lapor tenaga-kerjaan di perusahaan, peraturan keselamatan kerja, jaminan sosial tenaga kerja, peraturan pokok perasuransian, serta peraturan perpajakan tahun 1994.
60	2.01-1. 06 . 00151	Perpajakan Indonesia, Konsep, Aplikasi dan Penuntun Praktis	Anastasia Diana, S.E., Akt. Dan Lilis Setiawati	2004	Memuat pengetahuan dasar perpajakan, serta rincian petunjuk pelaksanaannya. Menyajikan contoh aplikasi perhitungan, pemungutan, pemotongan, dan pengisian Pemberitahuan Tahunan maupun Masa, baik Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Masuk serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
61	2.01-1. 06 . 00177	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Marihot P. Siahaan, S.E.	2005	Menjelaskan mengenai tata cara pengenaan serta pemungutan pajak dan retribusi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan dasar hukum yang baru hasil reformasi perpajakan dan retribusi daerah, yang disertai dengan pembahasan Peraturan Pemerintah Nomor 65 dan 66 Tahun 2001 sebagai aturan pelaksanaan UU Nomor 34 Tahun 2000.

62	2.01-1. 06 . 00337	Penegakan Hukum di Indonesia	Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H., Prof. Dr. Frans Limahelu, S.H., Prof. Dr. Indrati Rini, S.H., MS., Prof Dr. H. Muchsin, S.H., H. Ernanto Soedarno, S.H., Dr.H. Soekarwo, S.H., M.Hum, Dr. M. Zaidun, S.H., M.Si., Dr. H.M. Arief Muljadi, S.H., M.Si., Dr. Soeparjono, S.H., M.Si., Trimoelja D. Soerjadi, S.H., N.G. Yudara, S.H. (Seluruhnya Pakar Hukum Ikatan Alumni Universitas Airlangga Fakultas Hukum)	2006	Membahas mengenai pembangunan hukum , pencegahan dan pemberantasan KKN, Penegakan hukum di bidang Migas dan Kelistrikan Nasional, Otonomi daerah, Korporasi, Pendidikan Hukum, serta Pelayanan Publik.
63	2.01-1. 07 . 00463	Pilihan Forum Arbitrase dalam Sengketa Komersial untuk Penegakan Keadilan	Dr. Eman Suparman, S.H., M.H.	2004	Merupakan disertasi yang dimaksudkan untuk memahami apakah "pilihan forum arbitrase dalam menyelesaikan sengketa komersial, dapat menegakkan keadilan?". Dikaji melalui penelitian hukum doctrinal yaitu melalui bahan-bahan primer berupa perundang-undangan dan yurisprudensi, serta bahan-bahan sekunder berupa karya akademik. Selain itu juga melalui penelitian non-doktrinal yang dilakukan untuk mengungkapkan perilaku manusia (aksi dan interaksi) yang secara aktual terpola.
64	2.01-1. 07 . 00464	Hukum Tatanegara	Prof. Mr. Djokosoetono, Dihimpun oleh: Prof. DR. H. Harun Alrasid	2006	Kumpulan catatan perkuliahan yang disusun oleh Prof. DR. H. Harun Alrasid semasa mengikuti perkuliahan Prof. Mr. Djokosoetono.
65	2.01-1. 07 . 00465	Asas Hukum Acara Perdata, Dalam Teori dan Praktik	Drs. Faizal Kamil, S.H., M.H.	2005	Membahas masalah-masalah yang bersifat teori yang menjelaskan materi perundang-undangan hukum acara perdata dan contoh-contoh kasusnya yang kerap kali terjadi di masyarakat.

66	2.01-1. 07 . 00467	Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H.	2006	Menjelaskan mengenai pendirian bahwa korporasi adalah subjek tindak pidana yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana, menguraikan secara rinci sejarah pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi dan pandangan sejumlah negara tentang hal tersebut, sistem pertanggungjawaban pidana kepada korporasi dan doktrin-doktrin yang melandasinya, serta contoh kejahatan korporasi dan bentuk sanksi pidananya yang dilengkapi dengan analisis pasal-pasal yang memuat ketentuan tentang korporasi dalam KUHP, RUU KUHP, dan berbagai UU tindak pidana khusus.
67	2.01-1. 07 . 00468	Hukum Pasar Modal Indonesia	Hamud M. Balfas, S.H., LL. M	2006	Memberikan pemaparan yang komprehensif atas industri pasar modal dan masalah-masalah pasar modal mulai dari keputusan perusahaan melakukan go public hingga menyangkut perdagangan efek di bursa. Menjelaskan pula mengenai penawaran umum, efek di Indonesia, keterbukaan di pasar modal, penjaminan emisi efek, pencatatan efek, regulasi perusahaan efek, perdagangan efek di bursa, pemeriksaan hukum serta kejahatan pasar modal.
68	2.01-1. 07 . 00470	<i>Shipping</i> , Pengangkutan Intermodal Ekspor Impor Melalui Laut	Capt. R. P. Suyono	2005	<i>Shipping</i> di era globalisasi secara rinci, antara lain membahas jenis, fungsi, fasilitas, dan pelayanan pelabuhan, termasuk perusahaan dan instansi pemerintah yang terkait dalam kegiatan kepelabuhan. Selain itu juga mengenai ISPS Code, Pengawasan antar kepelabuhan (<i>port state control</i>), musibah kapal dan asuransi pelayaran, <i>freight forwarding</i> , pengoperasian petikemas, bongkar muat barang dan operasi muatan, <i>bill of lading</i> , incoterms 2000, serta jenis, ukuran, mesin, kelayakan, register, operasi kapal, penyewaan dan cara pemilihan kapal.
69	2.01-1. 07 . 00472	Kekuatan Hukum Berlakunya Sertifikat Sebagai Tanda Bukti	Adrian Sutedi, S.H., M.H.	2006	Kajian, ulasan, pembahasan dan analisis khususnya mengenai kekuatan Hukum Berlakunya Sertifikat Sebagai Tanda Bukti Hak Atas Tanah yang merupakan salah satu alat jaminan kepemilikan hak atas tanah secara hukum.

70	2.01-1. 07 . 00474	Hukum Surat Berharga dan Perkembangannya di Indonesia	Joni Emirzon	2002	Membahas tentang bagaimana latar belakang lahirnya surat berharga secara global, hal-hal umum tentang surat berharga, syarat-syarat surat berharga, klausula-klausula dalam surat berharga, dasar mengikat pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan surat berharga, upaya tangkisan dalam surat berharga, penggolongan dan bentuk-bentuk surat berharga, surat kesanggupan membayar, surat perintah membayar, bilyet giro, surat berharga yang diterbitkan lembaga perbankan, surat berharga komersial, kartu kredit, letterof credit, serta anjungan tunai mandiri.
71	2.01-1. 07 . 00478	Hak Menguasai Tanah Oleh Negara (Paradima Baru untuk Reformasi Agraria)	Muhammad Bakri	2007	Membahas mengenai wewenang negara untuk menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan tanah.
72	2.01-1. 07 . 00479	Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Terhadap Perbankan	Dr. Leden Marpaung, S.H.	2005	Menjelaskan mengenai pengertian tindak pidana terhadap bank, perubahan setelah berlakunya UU Nomor 10 Tahun 1998, gambaran keadaan/contoh kasus tindak pidana di bidang perbankan, kegiatan bank dan bank sentral, warkat bank, perlindungan perundang-undangan, modus operandi kasus/perkara perbankan, serta masalah pencegahan/prevensi (<i>the problem of prevention</i>).
73	2.01-1. 07 . 00480	Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, Pasca Reformasi	Prof. DR. Jimly Asshiddiqie, S.H.	2007	Membahas mengenai pengertian hukum tata negara, perkembangan konstitusi Indonesia, gagasan kedaulatan rakyat dan perembagaan parlemen, bentuk-bentuk produk hukum Indonesia, bentuk negara dan sistem pemerintahan, pemerintahan daerah, kekuasaan kehakiman, ha asasi manusia, kewarganegaraan, keimigrasian, partai politik da pemiliha umum, serta mengenai hukum keuangan negara.
74	2.01-1. 07 . 00481	Delik-Delik Khusus, Kejahatan-Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara	Drs. P.A.F. Lamintang, S.H.	1987	Membahas ketentuan-ketentuan pidana mengenai kejahatan-kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan-kejahatan terhadap martabat presiden dan wakil presiden, kejahatan-kejahatan berkenaan dengan pelaksanaan kewajiban-kewajiban dan hak-hak kewajiban, kejahatan terhadap ketertiban umum, dan kejahatan terhadap kekuasaan umum.
75	2.01-1. 07 . 00482	Delik-Delik Khusus, Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan	Drs. P.A.F. Lamintang, S.H.	1989	Konsep rancangan ketentuan-ketentuan pidana yang dibuat oleh BABINKUMNAS Departemen Kehakiman RI yang diusulkan agar dimasukkann ke dalam KUHP yang baru, yang mencakup ketentuan mengenai pencurian, pemerasa dan pengancaman, penggelapan, penipuan, perbuatan merugikan orang yang berpiutang dan orang yang berhak, penghancuran dan pengerusakan benda, serta pemudahan.

76	2.01-1. 07 . 00483	Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'	Dr. Chairul Huda, S.H., M.H.	2006	Mengkaji kesalahan terutama dalam hubungannya dengan tiga persoalan mendasar dalam hukum pidana: tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan pengenaan pidana. Pembahasan diawali dengan urgensi dan ruang lingkup kesalahan dan pertanggungjawaban pidana, dalam ilmu Hukum Pidana, perundang-undangan, dan putusan pengadilan, fokus pada kesalahan dan kaitannya dengan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan dipidananya pelaku, serta penerapan dan perkembangan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana dalam putusan pengadilan, khususnya dalam pertimbangan hukumnya.
77	2.01-1. 07 . 00484	Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana	Drs. Adami Chazawi, S.H.	2007	Menguraikan perihal petunjuk bagaimana kemahiran dan keterampilan hukum pidana itu dapat dibentuk, memaparkan hukum acara normatif dan penerapannya dalam kasus-kasus tertentu dengan contoh-contoh konkret, memunculkan teori hukum dan temuan hukum oleh berbagai yurisprudensi, serta memberikan petunjuk praktis dalam hal menyusun surat-surat penting untuk dipraktikkan dalam berlatih.
78	2.01-1. 07 . 00485	Korupsi dan Illegal Logging dalam Sistem Desentralisasi	Drs. IGM. Nurdjana, S.H., M. Hum. , Teguh Prasetyo, S.H., Msi., dan Sukardi, S.H., M.Hum.	2005	Memberikan gambaran tentang eksistensi korupsi dalam kejahatan illegal logging atau korelasi antara keduanya terutama terkait dengan kebijakan desentralisasi
79	2.01-1. 07 . 00486	Perkembangan Hukum Kontrak di luar KUH Perdata	H. Salim HS., S.H., M.S.	2006	Paparan mengenai hukum kontrak inomaat, mengenai kontrak surogasi, kontrak terapeutik, perjanjian kredit, standar kontrak, perjanjian kemitraan, perjanjian karya perusahaan, pertambangan batu bara, dan kontrak pengadaan barang. Dilengkapi dengan berbagai dokumen aplikasi atau permohonan dan dokumen kontrak seperti aplikasi kredit, aplikasi pengajuan permohonan pinjaman dalam perjanjian kemitraan, dokumen kontrak pada perjanjian kredit, perjanjian kemitraan, dan perjanjian asuransi.
80	2.01-1. 07 . 00488	Hukum Perjanjian, Teori dan Analisis Kasus	Suharnoko, S.H. MLI.	2007	Menyajikan berbagai aspek hukum perjanjian antara lain definisi perjanjian, akibat hukum yang ditimbulkan suatu perjanjian, analisa kreditur atas benda jaminan, keagenan, franchise, perlindungan konsumen, serta wanprestasi

81	2.01-1. 07 . 00489	Badan Hukum Yayasan (Edisi Revisi)	Prof. Dr. Chatamarrasjid Ais, S.H., M.H.	2006	Membahas mengenai yayasan pasca dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan, permasalahan yang masih dihadapi mengenai yayasan, dan mengenai yayasan yang didirikan oleh kekuasaan dan kewenangan suatu instansi, serta yayasan dibandingkan dengan wakaf dalam hukum islam. Dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan dan rancangan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan.
82	2.01-1. 07 . 00490	Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie, dan Percampuran Hutang	J. Satrio, S.N.	1999	Membahas cessie bersama-sama dengan subrogatie, novatie, kompensatie, dan percampuran hutang serta beberapa materi antara lain perjanjian obligatoir, levering benda pada umumnya, syarat-syarat levering dan lain sebagainya yang erat kaitannya dengan cessie.
83	2.01-1. 07 . 00491	Doktrin Subrogasi, Novasi, dan Cessie dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek, Code Civil Perancis, dan Common Law	Suharnoko, S.H. MLI. dan Endah Hartati, S.H., M.H.	2006	Membahas doktrin subrogasi, novasi, dan cessie serta penerapannya dalam praktik.
84	2.01-1. 07 . 00492	Hak Istimewa, Gadai, dan Hipotek	Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja	2005	Membahas hak-hak kreditor yang diatur dalam bab XIX, XX, dan XXI Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penjelasan ketentuan pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang merupakan ketentuan utama dalam hukum harta kekayaan. Membahas juga mengenai hak reklame dan hak retensi kreditor, jaminan kebendaan, gadai serta hipotek dengan sifat dan ciri-ciri khususnya.
85	2.01-1. 07 . 00493	Surat Berharga, Alat Pembayaran Dalam Masyarakat Modern	Imam Prayogo Suryohadibroto, S.H. dan Djoko Prakoso, S.H.	1995	Surat-surat berharga yang mudah diperdagangkan, yang mempunyai nilai tertentu yang dapat dialihkan dari satu tangan ke tangan yang lain dan mempunyai berbagai sifat khusus disebut dengan istilah <i>effecten</i> . <i>Effecten</i> termasuk diantaranya : Saham perseroan terbatas, obligasi, konosemen, wesel, aksep atau promis, cheque dan lain sebagainya. Dalam hukum, fungsi pokok dari <i>effecten</i> pada umumnya adalah sebagai alat pembuktian dalam hal terjadi perselisihan. Selain itu juga sebagai alat legitimasi bahwa pemegang surat berharga tersebut dianggap sebagai orang yang dapat melaksanakan atau mempunyai hak tertentu sehingga disebut juga sebagai surat-surat legitimasi (<i>legitimatiepapieren</i>).

86	2.01-1. 07 . 00497	Evolusi Kebijakan Pertanahan dalam Hukum Tanah Indonesia	Dr. B. F. Sihombing, S.H., M.H.	2005	Menjelaskan kebijakan pertanahan di Indonesia, khususnya di provinsi DKI Jakarta. Menekankan kepada makna pengaturan kepemilikan dan pengadaan tanah selama kurun waktu zaman pemerintahan Hindia Belanda, Jepang, dan setelah Indonesia merdeka dengan menggunakan teori <i>Legal System</i> (sistem hukum) dari Lawrence M. Friedman.
87	2.01-1. 07 . 00498	Segi Hukum Dana Pensiun	Zulaini Wahab, S.H., M.H.	2005	Menjelaskan mengenai dana pensiun dan segi hukum yang terdiri dari sejarah perkemabangan dana pensiun di Indonesia, badan hukum dana pensiun, asas-asas pokok dana pensiun, segi hukum perdata dana pensiun, segi hukum publik dana pensiun, segi hukum pidana dana pensiun, pembubaran, penggabungan dan pemisahan dana pensiun.
88	2.01-1. 07 . 00500	Hukum Perbankan Modern, Buku Kedua	Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M.	2004	Membahas berbagai persoalan hukum perbankan di tingkat <i>advance</i> , bahasanya bersifat baik yuridis teoritis maupun yuridis praktis. Banyak topik canggih dalam dunia hukum perbankan dibahas antara lain mengenai hukum tentang <i>margin trading</i> dan permainan derivatif, <i>electronic funds transfer money laundering</i> , atau hukum perbankan di negara-negara <i>tax haven</i> .
89	2.01-1. 07 . 00502	Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah	Prof. Dr. Abdul Halim, M.B.A., Akt.	2007	Membahas antara lain sejarah manajemen keuangan daerah, keuangan daerah sebagai bagian dari manajemen keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah sebagai bagian dari akuntansi, akuntansi keuangan daerah, akuntansi rekening-rekening dalam laporan keuangan daerah, akuntansi untuk BUMD. Disertai soal-soal dan penyelesaiannya dan telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.
90	2.01-1. 07 . 00504	Manajemen Keuangan Internasional	Purnomo Yusgiantoro	2004	Membahas materi keuangan internasional dari dua sudut pandang yaitu sudut pandang manajemen dan sudut pandang ekonomi (sains) keuangan internasional. Memuat antara lain perkembangan global dan lingkungan bisnis internasional, dasar dasar bisnis internasional, pasar keuangan internasional, pasar berjangka, neraca pembayaran dan perdagangan internasional, pasar valuta asing, penentuan kurs valuta asing, struktur modal, pendanaan internasional, keputusan investasi internasional, serta manajemen risiko.
91	2.01-1. 07 . 00505	Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	Drs. Nurlan Darise, Ak., M.Si.	2007	Membahas secara teknis tentang sistim pengelolaan keuangan daerah pada SKPD sejak perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pembuatan laporan keuangan.

92	2.01-1. 07 . 00506	Mengenal Kontrak Konstruksi di Indonesia	Ir. H. Nazarkhan Yasin	2006	Menguraikan tentang kontrak-kontrak konstruksi yang dibuat antara tahun 1966-1988, rentang tahun di mana pembuatan kontrak tidak mempunyai acuan/landasan baku. Selain itu terdapat koreksi atas beberapa kesalahan pengertian yang sudah terlanjur terjadi dalam masyarakat (salah kaprah) yang merugikan pelaku jasa konstruksi, bentuk dan isi kontrak yang berlaku di Indonesia, dan model-model kontrak yang berasal dari luar negeri. Menguraikan juga mengenai aspek keuangan/perbankan yang antara lain mencakup mengenai pentingnya nilai kontrak, cara pembayaran angsuran, perlunya jaminan yang telah disediakan oleh Penyedia Jasa maupun Pengguna Jasa dan mengenai Bank Garansi. Mengupas dan merangkaikan hubungan antara dunia kontrak penyedia bangunan dengan hukum perdata dan hukum pidana.
93	2.01-1. 07 . 00508	Teori dan Kapita Selekt Kriminologi	Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M	2007	Teori-teori klasik dalam konsep kriminologi dan analisa terhadap bentuk kejahatan baru sebagai produk peradaban maju dengan basis kecerdasan dalam berkalkulasi yang memerlukan metode yang lebih rasional dibandingkan dengan teori klasik yaitu melalui pendekatan sosiologi ekonomi makro.
94	2.01-1. 07 . 00509	Hukum Internasional, Hukum yang Hidup	Melda Kamil Ariadno, S.H., LL. M	2007	Bahasan masalah-masalah Hukum Internasional, mengenai kelautan, teknologi, perdagangan, masalah kewilayahan dan perikanan
95	2.01-1. 07 . 00510	Penerapan <i>Good Corporate Governance</i>	Indra Surya, S.H., LL.M. dan Ivan Yustiavandana, S.H., LL.M.	2006	Memaparkan berbagai hal yang berkaitan dengan <i>corporate governance</i> serta penerapannya di dunia usaha. Membahas tema mengenai konflik dan masalah kepemilikan serta kontrol, ragam penerapan, teori dasar, konsep dan pengertian <i>corporate governance</i> , karakteristik perusahaan publik di Indonesia, korelasi <i>good corporate governance</i> dengan kepentingan pemegang saham perusahaan, hukum nasional berkaitan dengan penerapan <i>good corporate governance</i> , fungsi dan tanggung jawab organisasi tambahan, beberapa contoh penerapan <i>corporate governance</i> .

96	2.01-1. 07 . 00511	Hukum dalam Ekonomi	Elsi Kartika Sari, S.H., M.H. dan Advendi Simangunsong, S.H., M.M.	2007	Kaitan antara hukum dan ekonomi, subjek dan objek yang dapat melakukan perbuatan lalu lintas hukum, pelaksanaan suatu perikatan, hubungan antara hukum perdata dengan hukum dagang serta bentuk-bentuk perusahaan, surat-surat berharga yang digunakan dalam lalu lintas perdagangan, hukum asuransi sebagai peralihan risiko dalam menjalankan suatu kegiatan, hak-hak atas kekayaan milik intelektual, pelaksanaan pasar modal, perlindungan konsumen terhadap produk tertentu, antimonopoli dan persaingan tidak sehat, kepailitan, dan bagaimana cara menyelesaikan suatu sengketa apabila terjadi perselisihan dengan menggunakan negosiasi, mediasi, serta arbitrase.
97	2.01-1. 07 . 00512	Corporate Governance (Suatu Pengantar)	Drs. Amin Widjaja Tunggal, Ak., MBA.	2007	Membahas mengenai konsep dasar <i>Corporate Governance</i> , komite audit, <i>board of directors</i> , internal auditing, kecurangan (fraud), COSO Enterprise Risk Management, mengenal Sarabane-Oxley Act, dan Risk Base Auditing dan dilengkapi dengan soal latihan serta kasus-kasus.
98	2.01-1. 07 . 00513	Hukum Itu Kepentingan	Pramudya	2007	Menyajikan tentang perubahan paradigma hukum dalam kebijakan publik di Indonesia, khususnya dalam kebijakan pembangunan ekonomi dengan cara memaparkan pembuatan kebijakan publik semasa Orde Baru dan di Era Reformasi dengan membandingkan kebijakan publik di bidang sosial, politik, dan ekonomi di kedua era tersebut dan selanjutnya dengan pendekatan konstruktivisme, mengkonstruksi kembali kenyataan-kenyataan sosial yang ada.
99	2.01-1. 07 . 00514	Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana di Bidang Perpajakan	Bambang Waluyo, SH. MH.	2006	Membahas tindak pidana di Bidang Perpajakan beserta Perkembangan dan Proses Penegakan Hukumnya, Perkembangan dan Penerapan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Kasus Perpajakan, Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, Putusan Pengadilan terhadap Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan, Inkonsistensi Penuntutan dan Putusan Pengadilan Terhadap Tindak Pidana Dibidang Perpajakan
100	2.01-1. 07 . 00515	The Corporation, Pengejaran Patologis Terhadap Harta dan Tahta	Joel Bakan	2007	Memaparkan wawancara mendalam dengan tokoh-tokoh ternama, seperti pemenang nobel Milton Friedman, guru bisnis Peter Drucker, dan kritikus budaya Noam Chomsky, yang menjelaskan bahwa korporasi zaman sekarang merupakan sebuah institusi patologis, yang memiliki kekuatan dahsyat yang berbahaya yang dapat mempengaruhi masyarakat.

101	2.01-1. 07 . 00516	Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia	Rimsky K. Judisseno	2005	Memaparkan informasi aktual perihal kondisi moneter dan perbankan di negara kita dan memberikan pemahaman tentang masalah-masalah moneter, masalah-masalah perbankan, serta fasilitas perbankan dalam perdagangan internasional yang berkaitan dengan masalah Letter of Credit.
102	2.01-1. 07 . 00517	Good Corporate Governance Pada Bank, Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris dalam Melaksanakannya	Leo J. Susilo dan Karlen Simarmata	2007	Membahas secara ekstensif mengenai Good Corporate Governance pada umumnya dan pelaksanaan GCG di Bank, termasuk contoh kasus yang terjadi, dan juga membahas prinsip GCG dihubungkan dengan peraturan perbankan dan hukum perusahaan, khususnya tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris Bank dalam pelaksanaan GCG.
103	2.01-1. 07 . 00518	Desain Proposal Penelitian, Panduan Tepat dan Lengkap Membuat Proposal Penelitian.	Suryaputra N. Awangga	2007	Membahas bagaimana cara menyusun Proposal Penelitian yang profesional, mulai dari Proposal Akademik untuk kalangan mahasiswa hingga Proposal Profesional untuk kalangan ilmuwan dan pakar.
104	2.01-1. 82 . 00367	Perlakuan Hukum Pidana Terhadap Pegawai negeri	Madjloes, S.H.	1981	Menjelaskan mengenai ketentuan-ketentuan pidana yang khusus bagi pegawai negeri.
105	2.01-1. 83 . 00405	Hukum Acara Perdata	Prof. R. Subekti, S.H.	1982	Membahas hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam "Reglemen Indonesia yang Dibaharui" (RID) yang nama aslinya adalah "Herziene Indonesisch Reglement" (HIR). Menjelaskan tiap-tiap tahap dari proses perdata dan bagaimana diterapkannya peraturan-peraturan H.I.R. dan R.G.B. dalam praktek dan bagaimana sebaiknya nanti diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Perdata Nasional. Juga membicarakan yurisprudensi dan surat-surat edaran dari Mahkamah Agung mengenai berbagai masalah yang merupakan bahan-bahan penting untuk menjalankan suatu peradilan yang baik.
106	2.01-1. 85 . 00375	Keputusan Pemasaran	Drs. E. Kusumadmo	1985	Mengupas mengenai dasar-dasar teori dan penerapan Manajemen Pemasaran yang berorientasi kepada karya Philip Kotler yang membahas tentang pendekatan bangun model. Membahas antara lain mengenai pembuatan keputusan dan analisis pemasaran, kebutuhan informasi pemasaran dalam pembuatan keputusan, segmentasi pasar, keputusan distribusi pemasaran, keputusan harga, keputusan periklanan, analisa transkasional di dalam personal selling, serta pemasaran bagi usaha non bisnis.

107	2.01-1. 87 . 00064	Kebijaksanaan Negara	Sjahir	1987	Membahas berbagai kebijaksanaan negara pada khususnya dan kebijaksanaan ekonomi pada umumnya, antara lain kebijaksanaan makro ekonomi dan proses penyesuaian di dalam negeri terhadap perubahan eksternal, kebijaksanaan di bidang moneter perbankan serta anggaran, perpajakan, pelayanan dan jasa publik, korupsi dan penyalahgunaan wewenang, sistem ekonomi dan perencanaan pembangunan, serta penelusuran kebijaksanaan negara sebagai proses, dalam topik privatisasi dan efisiensi.
108	2.01-1. 91 . 00180	Maintaining Information Systems in Organizations	E. Burton Swanson dan Cynthia Mathis Beath	1989	Membahas mengenai perbandingan perawatan sistem informasi, dan strategi-strategi alternatif untuk proses perawatan oleh manajemen, termasuk alternatif pendekatan untuk desain organisasi, pembagian tugas dan tanggung jawab, teknik kerja, dan peraturan untuk kordinasi dan pengendalian.
109	2.01-1. 91 . 00189	Rules of The High Court, 1980		1989	
110	2.01-1. 91 . 00377	Petunjuk Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai (Seri PPN) Tahun 1991, Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Masa PPN-1990	-	1991	Rangkuman kebijaksanaan pemerintah yang dituangkan dalam bentuk UU, KepMen, PerMenKeu, serta SE baik dari Dirjen Pajak maupun Menteri Keuangan sejak Januari 1990 hingga Desember 1990 yang menyangkut mengenai Pajak Pertambahan Nilai.
111	2.01-1. 92 . 00040	Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah	Dr. Paulus Effendie Lotulung S.H.	1986	Membandingkan sistem hukum yang menyangkut masalah Hukum Administrasi Negara yang diterapkan berbagai negara anantara lain Perancis, Inggris, Belanda, Jerman Barat, Amerika Serikat, Uni sovyet, Swedia, serta sistem yang berlaku di Indonesia.
112	2.01-1. 92 . 00047	Hukum Acara Perdata Indonesia	Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, S.H.	1988	membahas Pengertian yang mendalam tentang hukum acara perdata dan landasan yang teoritis sistematis dan juga tentang pengertian hukum acara perdata, sumber-sumber serta azas-azasnya dan kekuasaan kehakiman , tentang tata cara mengajukan gugatan termasuk upaya-upaya untuk menjamin hak , tentang pemeriksaan di persidangan , pembuktian , putusan serta upaya-upaya hukumnya dan tentang pelaksanaan putusan.juga pengetahuan praktis dengan mengetengahkan putusan-putusan pengadilan
113	2.01-1. 92 . 00137	Akuntansi, Suatu Pengantar, Buku I	Soemarso, S.R.	1992	Pembahasan mengenai dasar-dasar pengetahuan di bidang Akuntansi antara lain mengenai gambaran umum akuntansi, akuntansi dan kegiatan perusahaan, persamaan akuntansi, akuntansi perusahaan jasa, akuntansi perusahaan dagang, akuntansi perusahaan pabrik, serta aktiva lancar.

114	2.01-8. 93 . 00012	Korupsi, Pola kegiatan dan Penindakannya serta Peran Pengawasan dalam Penanggulangannya	Junaidi Soewartojo, S.E.	1992	Membahas mengenai korupsi dan pengaruhnya terhadap pembangunan nasional, pola kegiatan korupsi, pola penindakan korupsi, serta pokok-pokok pikiran dalam rangka menanggulangi/memberantas korupsi.
115	2.06-8. 93 . 00012	Korupsi, Pola kegiatan dan Penindakannya serta Peran Pengawasan dalam Penanggulangannya	Junaidi Soewartojo, S.E.	1992	Membahas mengenai korupsi dan pengaruhnya terhadap pembangunan nasional, pola kegiatan korupsi, pola penindakan korupsi, serta pokok-pokok pikiran dalam rangka menanggulangi/memberantas korupsi.
116	2.04-8. 93 . 00012	Korupsi, Pola kegiatan dan Penindakannya serta Peran Pengawasan dalam Penanggulangannya	Junaidi Soewartojo, S.E.	1992	Membahas mengenai korupsi dan pengaruhnya terhadap pembangunan nasional, pola kegiatan korupsi, pola penindakan korupsi, serta pokok-pokok pikiran dalam rangka menanggulangi/memberantas korupsi.
117	2.07-8. 93 . 00012	Korupsi, Pola kegiatan dan Penindakannya serta Peran Pengawasan dalam Penanggulangannya	Junaidi Soewartojo, S.E.	1992	Membahas mengenai korupsi dan pengaruhnya terhadap pembangunan nasional, pola kegiatan korupsi, pola penindakan korupsi, serta pokok-pokok pikiran dalam rangka menanggulangi/memberantas korupsi.
118	2.05-8. 93 . 00012	Korupsi, Pola kegiatan dan Penindakannya serta Peran Pengawasan dalam Penanggulangannya	Junaidi Soewartojo, S.E.	1992	Membahas mengenai korupsi dan pengaruhnya terhadap pembangunan nasional, pola kegiatan korupsi, pola penindakan korupsi, serta pokok-pokok pikiran dalam rangka menanggulangi/memberantas korupsi.
119	2.01-1. 93 . 00084	Indonesianisasi Saham	Erman Rajagukguk, S.H., LL.M.	1985	Membahas mengenai beberapa aspek hukum penanaman modal asing di Indonesia, Strategi Indonesia Mengawasi Modal Asing, dan Indonesianisasi Saham dalam Praktek
120	2.01-1. 94 . 00016	Contoh-Contoh Kontrak, Rekes, dan Surat Resmi Sehari-Hari, Jilid 2	Prof. MR. DR. Sudargo Gautama	1990	Memuat contoh kontrak terutama dalam rangka penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri serta kerjasama antara pengusaha-pengusaha Indonesia dan pengusaha-pengusaha asing yang baik disajikan dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Beberapa contoh antara lain tentang pendirian, pembubaran dan pembatalan perseroan, jual beli serta pemindahan hak atas saham, gadai saham dan hibah saham, perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, pinjam pakai rumah, dan lain sebagainya.
121	2.01-2. 94 . 00018	Contoh-Contoh Kontrak, Rekes Surat Resmi Sehari-Hari jilid 4	Prof. MR. DR. S. Gautama	1993	menyajikan kontrak-kontrak terutama yang banyak dipakai dalam praktek hukum diwaktu akhir-akhir ini tidak dilupakan masalah-masalah berkenaan dengan kerjasama dengan luar negeri dan berkenaan dengan penanaman modal asing dan contoh- contoh kontrak-kontrak, rekes-rekes dan surat-surat resmi sehari-hari yang telah diterbitkan terlebih dahulu oleh P. t. Kinta (keng Po)

122	2.01-2. 94 . 00018	Contoh-Contoh Kontrak, Rekes Surat Resmi Sehari-Hari jilid 4	Prof. MR. DR. S. Gautama	1993	menyajikan kontrak-kontrak terutama yang banyak dipakai dalam praktek hukum diwaktu akhir-akhir ini tidak dilupakan masalah-masalah berkenaan dengan kerjasama dengan luar negeri dan berkenaan dengan penanaman modal asing dan contoh- contoh kontrak-kontrak, rekes-rekes dan surat-surat resmi sehari-hari yang telah diterbitkan terlebih dahulu oleh P. t. Kinta (keng Po)
123	2.02-2. 94 . 00019	Contoh-Contoh Kontrak, Rekes dan Surat Resmi Sehari-Hari Jilid 5	Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama	1991	Memuat contoh-contoh, kontrak-kontrak, rekes-rekes dan surat-surat sehari-hari terutama contoh tentang kontrak-kontrak dagang yang banyak dipakai terutama setelah deregulasi dan bertambahnya partisipasi modal asing dalam bidang perniagaan dan industri di Indonesia, termasuk diantaranya <i>Joint Venture Agreement</i> , perjanjian distribusi, perjanjian lisensi (<i>license agreement</i>), perjanjian pemberian bantuan teknik (<i>technical assistance agreement</i>) dan lain-lain perjanjian antara pihak Indonesia dan luar negeri. Disajikan pula perjanjian hutang oleh pihak bank luar negeri pada perusahaan di Indonesia dengan disertai ikatan-ikatan jaminannya yang lazim diminta semisal <i>mortgage</i> atau <i>fiducia</i> .
124	2.01-2. 94 . 00019	Contoh-Contoh Kontrak, Rekes dan Surat Resmi Sehari-Hari Jilid 5	Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama	1991	Memuat contoh-contoh, kontrak-kontrak, rekes-rekes dan surat-surat sehari-hari terutama contoh tentang kontrak-kontrak dagang yang banyak dipakai terutama setelah deregulasi dan bertambahnya partisipasi modal asing dalam bidang perniagaan dan industri di Indonesia, termasuk diantaranya <i>Joint Venture Agreement</i> , perjanjian distribusi, perjanjian lisensi (<i>license agreement</i>), perjanjian pemberian bantuan teknik (<i>technical assistance agreement</i>) dan lain-lain perjanjian antara pihak Indonesia dan luar negeri. Disajikan pula perjanjian hutang oleh pihak bank luar negeri pada perusahaan di Indonesia dengan disertai ikatan-ikatan jaminannya yang lazim diminta semisal <i>mortgage</i> atau <i>fiducia</i> .
125	2.01-2. 94 . 00020	Contoh-Contoh Kontrak, Rekes dan Surat Resmi Sehari-Hari Jilid 6	Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama	1991	Memuat contoh-contoh, kontrak-kontrak, rekes-rekes dan surat-surat sehari-hari terutama kontrak-kontrak seperti <i>leasing factoring</i> (anjak piturang), <i>franchise</i> , <i>licensing</i> , baik dari <i>trademark</i> maupun dari <i>know-how</i> dan lain sebagainya. Selain menghimpun kontrak-kontrak dalam bahasa Indonesia, juga dihimpun contoh-contoh dari praktek dalam bahasa Inggris.

126	2.02-2. 94 . 00020	Contoh-Contoh Kontrak, Rekes dan Surat Resmi Sehari-Hari Jilid 6	Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama	1991	Memuat contoh-contoh, kontrak-kontrak, rekes-rekes dan surat-surat sehari-hari terutama kontrak-kontrak seperti <i>leasing factoring</i> (anjak piturang), <i>franchise</i> , <i>licensing</i> , baik dari <i>trademark</i> maupun dari <i>know-how</i> dan lain sebagainya. Selain menghimpun kontrak-kontrak dalam bahasa Indonesia, juga dihimpun contoh-contoh dari praktek dalam bahasa Inggris.
127	2.01-2. 94 . 00021	Contoh-Contoh Kontrak, Rekes Surat Resmi Sehari-Hari jilid 10	Prof. MR. DR. S. Gautama	1992	menyajikan acara 'go public" mengenai penawaran saham-sham dalam perseroan terbatas, juga perjanjian kredit antara bank asing dan nasabah di Indonesia, bank nasional dan nasabahnya, jaminan-jaminan bagi pihka kreditor dan berbagai bentuk pembukuan "letter of credit" beserta persyaratannya, beserta contoh-contoh lain berkenaan dengan pemberian lisensi ini, dan bantuan teknik, juga berbagai contoh mengenai pengajuan permohonan hak paten dan hak cipta dihimpun pula, disamping contoh perkara merk di hadapan instansi pengadilan secara lengkap , juga diberikan contoh lain dari perjanjian distribusi " after sale service oleh prinsipal dari luar negeri dan distribusi nasional
128	2.02-2. 94 . 00021	Contoh-Contoh Kontrak, Rekes Surat Resmi Sehari-Hari jilid 10	Prof. MR. DR. S. Gautama	1992	menyajikan acara 'go public" mengenai penawaran saham-sham dalam perseroan terbatas, juga perjanjian kredit antara bank asing dan nasabah di Indonesia, bank nasional dan nasabahnya, jaminan-jaminan bagi pihka kreditor dan berbagai bentuk pembukuan "letter of credit" beserta persyaratannya, beserta contoh-contoh lain berkenaan dengan pemberian lisensi ini, dan bantuan teknik, juga berbagai contoh mengenai pengajuan permohonan hak paten dan hak cipta dihimpun pula, disamping contoh perkara merk di hadapan instansi pengadilan secara lengkap , juga diberikan contoh lain dari perjanjian distribusi " after sale service oleh prinsipal dari luar negeri dan distribusi nasional
129	2.01-2. 94 . 00022	Contoh-Contoh Kontrak, Rekes, dan Surat Resmi Sehari-Hari, Jilid 8	Prof. MR. DR. Sudargo Gautama	1991	Menjelaskan mengenai perjanjian leasing untuk barang-barang berharga yang membutuhkan suatu peraturan yang lengkap untuk melindungi kepentingan pihak yang mengeluarkan financing untuk perjanjian leasing yang bersangkutan, yang juga disertai jaminan bagi pihak lessor yang berupa perseorangan maupun perusahaan.

130	2.02-2. 94 . 00022	Contoh-Contoh Kontrak, Rekes, dan Surat Resmi Sehari-Hari, Jilid 8	Prof. MR. DR. Sudargo Gautama	1991	Menjelaskan mengenai perjanjian leasing untuk barang-barang berharga yang membutuhkan suatu peraturan yang lengkap untuk melindungi kepentingan pihak yang mengeluarkan financing untuk perjanjian leasing yang bersangkutan, yang juga disertai jaminan bagi pihak lessor yang berupa perseorangan maupun perusahaan.
131	2.01-2. 94 . 00023	Contoh-Contoh Kontrak, Rekes, dan Surat Resmi Sehari-Hari, Jilid 9	Prof. MR. DR. Sudargo Gautama	1992	Membahas contoh perjanjian antar usahawan Indonesia dan perusahaan asing dan kontrak-kontrak yang mengandung unsur asing yang karenanya bersifat Hukum Perdata Internasional. Menyajikan pula contoh-contoh dari proses go public berkenaan dengan emissie dari surat-surat obligasi, contoh-contoh perjanjian kredit dan pengikatan jaminan-jaminan, baik dari Bank Asing maupun Bank Nasional serta memperhatikan pula perumusan-perumusan dari klausula arbitrase.
132	2.02-2. 94 . 00023	Contoh-Contoh Kontrak, Rekes, dan Surat Resmi Sehari-Hari, Jilid 9	Prof. MR. DR. Sudargo Gautama	1992	Membahas contoh perjanjian antar usahawan Indonesia dan perusahaan asing dan kontrak-kontrak yang mengandung unsur asing yang karenanya bersifat Hukum Perdata Internasional. Menyajikan pula contoh-contoh dari proses go public berkenaan dengan emissie dari surat-surat obligasi, contoh-contoh perjanjian kredit dan pengikatan jaminan-jaminan, baik dari Bank Asing maupun Bank Nasional serta memperhatikan pula perumusan-perumusan dari klausula arbitrase.
133	2.02-2. 94 . 00024	Contoh-Contoh Kontrak, Rekes, dan Surat Resmi Sehari-Hari, Jilid 7	Prof. MR. DR. Sudargo Gautama	1991	Himpunan contoh perkara merk di hadapan pengadilan secara lengkap (di hadapan pengadilan negeri, kasasi, mahkamah agung, dan peninjauan kembali), contoh perjanjian berkenaan dengan pembelian kapal asing milik perusahaan luar negeri oleh pembeli perusahaan Indonesia, contoh perjanjian sekitar pembelian pabrik oleh perusahaan Indonesia dengan kredit yang diperoleh dari Lembaga Keuangan asing dalam rangka pemberian kredit kepada negara-negara berkembang, struktur pembiayaan, pengikatan jaminan dan asuransi kredit secara keseluruhan, juga contoh perjanjian pengalihan saham antara para pemegang saham dalam rangka penambahan modal perusahaan PMA.

134	2.01-2. 94 . 00024	Contoh-Contoh Kontrak, Rekes, dan Surat Resmi Sehari-Hari, Jilid 7	Prof. MR. DR. Sudargo Gautama	1991	Himpunan contoh perkara merk di hadapan pengadilan secara lengkap (di hadapan pengadilan negeri, kasasi, mahkamah agung, dan peninjauan kembali), contoh perjanjian berkenaan dengan pembelian kapal asing milik perusahaan luar negeri oleh pembeli perusahaan Indonesia, contoh perjanjian sekitar pembelian pabrik oleh perusahaan Indonesia dengan kredit yang diperoleh dari Lembaga Keuangan asing dalam rangka pemberian kredit kepada negara-negara berkembang, struktur pembiayaan, pengikatan jaminan dan asuransi kredit secara keseluruhan, juga contoh perjanjian pengalihan saham antara para pemegang saham dalam rangka penambahan modal perusahaan PMA.
135	2.01-2. 94 . 00025	Contoh-Contoh Kontrak, Rekes, dan Surat Resmi Sehari-Hari, Jilid 11	Prof. MR. DR. Sudargo Gautama	1992	Meninjau masalah prosedur penanaman modal asing dan permodalan dalam negeri melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM dengan contoh-contoh yang didasarkan atas formulir-formulir yang dikeluarkan oleh BKPM berkenaan dengan prosedur penanaman modal ini. Juga memuat contoh sindikasi loan oleh bank-bank yang sama dalam memberikan pinjaman kepada pengusaha di Indonesia, serta contoh perjanjian kredit dari bank-bank untuk keperluan khusus.
136	2.02-2. 94 . 00025	Contoh-Contoh Kontrak, Rekes, dan Surat Resmi Sehari-Hari, Jilid 11	Prof. MR. DR. Sudargo Gautama	1992	Meninjau masalah prosedur penanaman modal asing dan permodalan dalam negeri melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM dengan contoh-contoh yang didasarkan atas formulir-formulir yang dikeluarkan oleh BKPM berkenaan dengan prosedur penanaman modal ini. Juga memuat contoh sindikasi loan oleh bank-bank yang sama dalam memberikan pinjaman kepada pengusaha di Indonesia, serta contoh perjanjian kredit dari bank-bank untuk keperluan khusus.

137	2.01-1. 94 . 00055	Masalah-Masalah Perdagangan, Perjanjian, Hukum Perdata Internasional dan Hak Milik Intelektual	Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama	1992	Memuat mengenai masalah-masalah di bidang Perdagangan, Perjanjian (treaties) dan Hukum Perdata Internasional, dikaitkan dengan perubahan-perubahan di bidang perlindungan Hak Milik Intelektual. Masalah-masalah aktual seperti perjanjian multilateral tentang <i>General Agreement on Tariffs and Trade</i> (GATT), <i>Generalised System of Preferences</i> (GSP), <i>Most Favoured Nation clause</i> (MFN), prinsip <i>National Treatment</i> , perjanjian bilateral tentang kerja sama eksploitasi celah Timor antara Indonesia dan Australia (UU 1991 No. 1). Juga dilampirkan naskah dari perjanjian perdagangan internasional serta <i>Treaty</i> kerja sama eksploitasi Indonesia dan Australia.
138	2.01-2. 94 . 00148	Penyelesaian Kerugian Negara	Drs. J. Kardjo	1994	Menjelaskan mengenai antara lain penyelesaian damai, tuntutan ganti rugi, tuntutan perbendaharaan, pembayaran uang pengganti, tuntutan perdata, serta penyelesaian-penyelesaian administrasi lebih lanjut.
139	2.02-2. 94 . 00148	Penyelesaian Kerugian Negara	Drs. J. Kardjo	1994	Menjelaskan mengenai antara lain penyelesaian damai, tuntutan ganti rugi, tuntutan perbendaharaan, pembayaran uang pengganti, tuntutan perdata, serta penyelesaian-penyelesaian administrasi lebih lanjut.
140	2.02-2. 95 . 00004	Hukum Perdata Internasional Indonesia	Prof. Dr. S. Gautama S.H.	1986	Membahas mengenai teori-teori umum " <i>regles generales</i> " dari hukum perdata Internasional dan memuat soal-soal tentang sistematik Hukum Perdata Internasional Indonesia, tentang titik-titik pertalian (<i>aanknopingspunten</i>) serta khususnya tentang titik-titik laut, kewarganegaraan, dan <i>Domicilie</i> .
141	2.01-2. 95 . 00004	Hukum Perdata Internasional Indonesia	Prof. Dr. S. Gautama S.H.	1986	Membahas mengenai teori-teori umum " <i>regles generales</i> " dari hukum perdata Internasional dan memuat soal-soal tentang sistematik Hukum Perdata Internasional Indonesia, tentang titik-titik pertalian (<i>aanknopingspunten</i>) serta khususnya tentang titik-titik laut, kewarganegaraan, dan <i>Domicilie</i> .
142	2.02-2. 95 . 00009	Perkembangan Arbitrase Dagang Internasional di Indonesia	Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama	1989	Membahas masalah-masalah di sekitar arbitrase dagang internasional khususnya keadaan di Indonesia yang telah dijadikan bahan penyelidikan. Membahas pula mengenai persoalan-persoalan praktis yang timbul disekitar arbitrase dagang internasional yang sudah dihadapi dan dibahas dalam praktek hukum di Indonesia. Dilengkapi dengan teks dari berbagai konvensi dan peraturan yang pernah tersebar di berbagai publikasi.

143	2.01-2. 95 . 00015	Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Komputer	DR. Andi Hamzah, S.H.	1993	Membahas mengenai jenis penyalahgunaan komputer, kasus-kasus kejahatan komputer di pengadilan, prevensi penyalahgunaan komputer dan perlindungan perangkat lunak komputer, serta mengenai komputer dan penegak hukum.
144	2.02-2. 95 . 00015	Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Komputer	DR. Andi Hamzah, S.H.	1993	Membahas mengenai jenis penyalahgunaan komputer, kasus-kasus kejahatan komputer di pengadilan, prevensi penyalahgunaan komputer dan perlindungan perangkat lunak komputer, serta mengenai komputer dan penegak hukum.
145	2.01-1. 95 . 00017	Contoh-Contoh Kontrak, Rekes Surat Resmi Sehari-Hari jilid 3	Prof. MR. DR. S. Gautama	1994	menyajikan contoh-contoh yang berkenaan dengan kerjasama dengan modal luar negeri seperti Technical assistance agreement serta lain-lain contoh berkenaan dengan perseroan terbatas dan lain-lain kontrak seperti tentang pendirian, pembubaran dan pembatalan perseroan, jual beli serta pemindahan hak atas saham, gadai saham dan hibah saham, perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa dan pinjam pakai rumah dsb
146	2.01-1. 95 . 00034	Proses Penanganan Perkara Pidana, Bagian Pertama	Leden Marpaung, S.H.	1992	Membahas mengenai proses penanganan perkara pidana, pembuktian, tersangka/pembela, peradilan, penyidikan, koneksitas, ketentuan khusus acara pidana, serta kejaksanaan.
147	2.01-1. 95 . 00035	Proses Penanganan Perkara Pidana, Bagian Ke Dua	Leden Marpaung, S.H.	1992	Membahas mengenai proses penanganan perkara pidana yang meliputi pelimpahan berkas perkara ke kejaksanaan, surat dakwaan, pelimpahan berkas perkara ke pengadilan, sikap pengadilan atas pelimpahan berkas perkara biasa, prinsip-prinsip pemeriksaan di persidangan, pemeriksaan di persidangan, requisitoir-pleidoi-replik-duplik, putusan pengadilan negeri, syarat-syarat putusan, upaya hukum, kasasi, upaya hukum luar biasa, serta eksekusi.
148	2.01-1. 95 . 00038	Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan	H. Hamrat Hamid, S.H., dan Harun M. Husein, S.H.	1992	Pembahasan permasalahan-permasalahan KUHAP-Bidang Penyidikan (dalam bentuk tanya jawab) yang terungkap dalam forum-forum pertemuan resmi antar aparata penegak hukum, baik yang berifat instansional maupun yang bersifat instansional koordinatif dengan teknis yuridis teoritis dan teknis yuridis praktis.

149	2.01-1. 95 . 00044	Pengantar Ilmu Hukum Pajak	R. Santoso Brotodihardjo, S.H.	1993	Menjelaskan hal-hal mengenai hukum pajak antara lain definisi tugas dan kegunaan Hukum Pajak, asas-asas pemungutan pajak, pembagian Hukum Pajak dan pembedaannya, pembedaan pajak dan pembagiannya, utang pajak, peradilan dalam Hukum Pajak, penafsiran dalam Hukum Pajak, tarif pajak, penagihan pajak, fungsi pajak yang bersifat mengatur serta Hukum Pajak Internasional
150	2.01-1. 95 . 00046	Etika Profesional dan Hukum Profesi Advokat	Oemar Seno Adji	1991	Membahas mengenai pengantar global profesi Advokat-Dokter-Wartawan dalam etika hukum pidana, Etika profesional dan hukum, pengawasan surat keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman, Kode Etik Advokat Indonesia, serta keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia.
151	2.01-1. 95 . 00059	Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Ekonomi	Leden Marpaung, S.H.	1994	Membahas mengenai tindak pidana ekonomi, pemberantasan tindak pidana ekonomi, BRO (<i>Bedrijfs Reglementering Ordonansi</i> 1934), barang dalam pengawasan, ordonansi bea, hal-hal yang perlu diperhatikan pada penanganan kasus/perkara tindak pidana ekonomi, serta masalah prevensi.
152	2.01-1. 95 . 00068	Hukum Narkotika Indonesia	DR. Soedjono Dirdjosisworo, S.H.	1990	Paparan-paparan mengenai aspek yuridis, tujuan historis, analisis, dan lain sebagainya dari peraturan penyalahgunaan narkotika dan penerapannya.
153	2.01-1. 95 . 00078	Upetisme, Ditinjau dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tahun 1971	Djoko Prakoso, S.H. dan Ati Suryati, S.H.	1986	Membahas mengenai pengertian tindak pidana korupsi dan upetisme, subyek daripada upetisme, bentuk-bentuk upetisme, serta studi kasus masalah upetisme dalam praktek pengadilan yang dilengkapi dengan kesimpulan dan saran.
154	2.02-2. 95 . 00078	Upetisme, Ditinjau dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tahun 1971	Djoko Prakoso, S.H. dan Ati Suryati, S.H.	1986	Membahas mengenai pengertian tindak pidana korupsi dan upetisme, subyek daripada upetisme, bentuk-bentuk upetisme, serta studi kasus masalah upetisme dalam praktek pengadilan yang dilengkapi dengan kesimpulan dan saran.
155	2.01-2. 95 . 00078	Upetisme, Ditinjau dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tahun 1971	Djoko Prakoso, S.H. dan Ati Suryati, S.H.	1986	Membahas mengenai pengertian tindak pidana korupsi dan upetisme, subyek daripada upetisme, bentuk-bentuk upetisme, serta studi kasus masalah upetisme dalam praktek pengadilan yang dilengkapi dengan kesimpulan dan saran.

156	2.01-1. 95 . 00086	Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, dan Peradilan Tata Usaha Negara	Drs. Sudarsono, S.H.	1994	Menjelaskan mengenai Pengadilan Negeri dalam pemeriksaan perkara, tugas Pengadilan Negeri dalam pengawasan, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Tata Usaha Negara, keberadaan Jaksa, Hakim, dan Peradilan Umum.
157	2.01-1. 95 . 00089	Hukum Merek Indonesia	Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, S.H.	1993	Meninjau persoalan merek dari segi praktis dan berbagai keputusan-keputusan perkara seperti "Tancho", "Y.K.K.", dan "Supermi" berikut yurisprudensi lainnya dan disesuaikan dengan Undang-Undang Merek 1993.
158	2.01-1. 95 . 00096	Tindak Pidana Hak Cipta, Analisis dan Penyelesaiannya	Widyopramono	1992	Hasil analisa beberapa kasus tindak pidana hak cipta.
159	2.01-1. 95 . 00097	Komentar atas Undang-Undang Merek Baru Tahun 1992 dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya	Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, S.H.	1994	Komentar atas Undang-Undang Tahun 1992 N0. 19 dengan Peraturan-peraturan Pemerintah No. 23 dan No. 24 Tahun 1993 sebagai pelaksanaannya. Membahas antara lain perubahan sistem deklaratip menjadi sistem konstitutip, syara-syarat untuk merek, persamaan merek dalam jurisprudensi, perjanjian lisensi dalam Undang-Undang Merek Baru, hal yang harus dimuat dalam perjanjian lisensi tentang Merek, hak dan kewajiban dan penerima lisensi merek, tata cara permintaan pencatatan perjanjian lisensi pada kantor merek, prosedur pendaftaran merek melalui pengumuman dan keberatan, peranan pengadilan dalam soal merek, perpanjangan pendaftaran merek dan pengalihan, penghapusan dan pembatalan pendaftaran merek, merek kolektif, gugatan mengenai ganti rugi dan tuntutan pidana, serta ketentuan peralihan.
160	2.01-1. 95 . 00101	Hukum Antargolongan, Suatu Pengantar	Prof. MR. DR. S. Gautama (Gouw Giok Siong)	1993	Menjelaskan pengertian hukum antar tata hukum, sistematik hukum antar tata hukum, titik-titik pertalian (<i>aanknopingspunten</i>), kaidah-kaidah hukum dan azas-azas praktek hukum, penggantian hukum dan pilihan hukum, serta kedudukan hukum antargolongan dikemudian hari.
161	2.01-1. 95 . 00107	Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945	Dr. Bagir Manan, S.H., M.C.L.	1994	Merupakan disertasi yang menemukan dan mengembangkan teori mengenai hubungan antara pusat dan daerah menurut UUD 1945 serta menemukan landasan dan indikator konkret yang dapat dijadikan pedoman mengatur, menyusun dan mengembangkan hubungan serasi antara pusat dan daerah menurut UUD 1945.
162	2.01-1. 95 . 00124	Pembangunan Hukum di Indonesia	Prof. Padmo Wahjono, S.H.	1989	Membahas pemikiran penjajagan mengenai pembngnan, penegakan dan pengembangan masyarakat dengan suatu hukum nasional.

163	2.01-2. 95 . 00134	Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata	Darwan Prinst, S.H.	1992	Menjelaskan mengenai pandangan umum tentang gugatan, gugatan dalam praktek, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam gugatan, alasan-alasan mengajukan gugatan, pemeriksaan di depan pengadilan, putusan atas gugatan, serta upaya hukum.
164	2.01-1. 95 . 00145	Praktek Pengurusan Sertifikat Hak atas Tanah	Effendi Perangin, S.H.	1992	Penjelasan dalam menghadapi persoalan sehari-hari dengan tanah, khususnya tentang segala sesuatu mengenai sertifikat hak atas tanah, sertifikat hak tanggungan, acara memperoleh sertifikat tanah bekas hak adat atau hak barat, serta sertifikat hilang atau rusak.
165	2.01-1. 95 . 00157	Kejahatan Komputer	Suheimi	1991	Memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang sering timbul tentang kejahatan komputer berdasarkan kejadian sesungguhnya, menjelaskan mengenai definisi kejahatan komputer dan jenis-jenisnya, siapa yang termasuk pelaku kejahatan komputer, ciri-ciri kejahatan komputer, serta alasan-alasan yang melatarbelakangi kejahatan komputer.
166	2.01-1. 95 . 00195	Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil di Indonesia	Djoko Prakoso, S.H.	1992	Menjelaskan mengenai pentingnya peranan dan kedudukan pegawai negeri, segi-segi kedisiplinan dalam kepegawaian Indonesia, hak dan kewajiban PNS, peraturan disiplin PNS, tindakan administratif dan hukuman disiplin terhadap PNS yang memiliki/menggunakan ijazah palsu, serta pemberhentian PNS.
167	2.01-1. 95 . 00309	Mempersiapkan Lapisan Dasar Konstruksi, Bagian 1	Ir. Imam Soekoto	1993	Menjelaskan mengenai persiapan lapisan dasar bagi konstruksi aspal untuk landasan terbang dan jalan raya disertai dengan contoh-contoh.
168	2.01-1. 95 . 00310	Mempersiapkan Lapisan Dasar Konstruksi, Bagian 2	Ir. Imam Soekoto	1993	Menjelaskan mengenai pekerjaan-pekerjaan persiapan lapisan dasar antara lain mengenai alat-alat angkut, <i>road gradgers</i> , alat-alat untuk pemadatan tanah, alat-alat untuk perbaikan mutu tanah, menghitung jumlah penggusuran tanah, merencanakan peralatan yang dipergunakan, pematokan lapangan, dan beberapa hakekat pelaksanaan penggusuran tanah.
169	2.01-1. 95 . 00311	Ekonomi Teknik Jilid I	Ir. FX. Marsudi Joyowiyono, S.E.	1993	Merupakan buku panduan ilmu ekonomi teknik yang mencakup antara lain pengenalan kepada ekonomi teknik, dasar-dasar pengertian ekonomi, matematika uang, metode-metode perbandingan ekonomi, dan beberapa macam analisa ekonomi teknik.

170	2.01-1. 95 . 00312	Ekonomi Teknik Jilid II	Ir. FX. Marsudi Joyowiyono, S.E.	1992	Merupakan buku panduan ilmu ekonomi teknik yang mencakup antara lain penilaian, penyusutan dan perpajakan, studi ekonomi proyek pekerjaan umum, pekerjaan-pekerjaan perindustrian, estimasi, risiko, dan ketidak-pastian, serta studi kelayakan.
171	2.01-1. 95 . 00313	Konstruksi Jalan Raya	Ir. Djoko Untung Soedarsono	1993	Menjelaskan mengenai sejarah fungsi dan perkerasan jalan raya, perhitungan tebal perkerasan dengan metode tanpa bahan pengikat (<i>unbound method</i>), rumus analitis yang dengan bahan pengikat (<i>bound method</i>), perhitungan tebal konstruksi perkerasan untuk jalan-jalan sementara/jalan substandard, bahan untuk lapisan-lapisan konstruksi perkerasan, konstruksi jalan murah, serta pemeliharaan.
172	2.01-1. 95 . 00314	Mekanika Tanah	Dr. Ir. L. D. Wesley	1988	Menjelaskan mengenai prinsip-prinsip mekanika tanah, yang antara lain terdiri atas sifat-sifat umum tanah, deskripsi dan klasifikasi tanah, metoda-metoda penyelidikan lapangan, pemadatan tanah, prinsip tekanan efektif, perembesan air dalam tanah, konsolidasi dan penurunan, kekuatan geser tanah, daya dukung tanah, perencanaan fondasi, tekanan tanah dan dinding penahan, kemantapan lereng, serta perencanaan perkerasan jalan.
173	2.01-1. 95 . 00315	Pengendalian Pelaksanaan Konstruksi	Ir. Imam Soekoto	1993	Menjelaskan mengenai project analysis, dasar-dasar penilaian ekonomis, memilih di antara berbagai alternatif, operations research, penyempurnaan terhadap rencana pendahuluan, penjadwalan pelaksanaan pekerjaan, critical path method (CPM), prosedur dan organisasi, fungsi-fungsi manajerial di dalam pelaksanaan pekerjaan, serta masalah kepemimpinan dalam manajemen dengan disertai contoh-contoh yang diambilkan dari pelaksanaan proyek landasan terbang.
174	2.01-1. 95 . 00316	Alat-Alat Berat dan Penggunaannya	Ir. Rochmanhadi	1992	Menjelaskan mengenai jenis, fungsi, dan cara kerja alat-alat berat yang pokok-pokok bahasannya antara lain: pengenalan umum alat berat, jenis alat-alat besar, pengerukan (<i>dredging</i> kompresor dan pompa air, pemecah batu, peralatan pembetonan, serta urutan cara perhitungan rencana anggaran biaya pekerjaan (<i>engineer's estimate</i>))

175	2.01-1. 95 . 00318	Berbagai Macam Metode Perhitungan Tebal Lapisan-Lapisan Konstruksi Perkerasan Jalan yang Lentur (Flexible) pada Jalan Raya dan Jalan Kerja	Ir. Djoko Untung Soedarsono	1992	Memberikan penjelasan mengenai kegiatan konstruksi jalan raya yang mencakup antara lain penjelasan tentang sistem Un-Bond (dianggap tanpa bahan pengait) dan sistem Bond (dianggap dengan bahan pengait, jalan-jalan sub standar, metode perhitungan tebal perkerasan dengan mempergunakan N (jumlah total lintas ekuivalen selama umur rencana). Dilengkapi dengan rumus-rumus untuk jalan-jalan sub standar dan contoh-contoh perhitungan bandingan untuk jalan Jakarta By-pass, jalan Jagorawi, dan jalan kerja.
176	2.01-1. 95 . 00319	Perhitungan Biaya Pelaksanaan Pekerjaan Dengan Menggunakan Alat-Alat Berat	Ir. Rochmanhadi	1993	Menjelaskan secara sistematis cara pelaksanaan pembuatan perhitungan biaya pelaksanaan pekerjaan dengan menggunakan alat-alat berat.
177	2.01-1. 95 . 00321	Uraian Lengkap Methode Network Panning, Jilid I	Ir. Soetomo Kajatno	1992	Membahas mengenai network planning yang mencakup pengertian network planning, cara perencanaan sebuah proyek, caranetwork-plan, bentuk network plan, menyiapkan network untuk pelaksanaan pekerjaan sesungguhnya, network untuk propaganda, waktu dalam network, serta cara menganalisa. Disertai contoh-contoh yang memadai.
178	2.01-1. 95 . 00322	Uraian Lengkap Methode Network Panning, Jilid II	IR. Soetomo Kajatno	1992	Menjelaskan mengenai EET dan LET dan Lintasan Kritis dengan cara Matriks, Slack dan Float, Event Slick, contoh Free Float, Resources Allocation (Penyatuan Sumber-sumber tenaga dan biaya), contoh lain pengaturan Resources, serta pandangan dari sudut management.
179	2.01-1. 95 . 00323	Uraian Lengkap Methode Network Panning, Jilid III	IR. Soetomo Kajatno	1992	Menjelaskan mengenai Komputerisasi Network Planning yang dibagi menjadi dua bahasan yaitu pertama mengenai Informasi Umum yang mencakup penjelasan kegiatan, network, report dan proses, sedangkan yang kedua mengenai input mencakup penjelasan mengenai kartu-kartu input, bentuknya, serta susunan letak kartu input.
180	2.01-1. 95 . 00324	Pengaspalan	Departemen Pekerjaan Umum, Direktorat Bina Marga	1992	Membahas tentang Persiapan Pekerjaan Jalan, Material, Peralatan, Priming, Pengaspalan Permukaan satu lapis, Pengaspalan Permukaan lebih dari satu Lapis dan Penetrasi Makadam
181	2.01-1. 95 . 00325	Jalan Tak Beraspal	Departemen Pekerjaan Umum, Direktorat Bina Marga	1983	Membahas Tentang Bagian-bagian jalan tak beraspal, bahan-bahan jalan tidak beraspal dan Penggunaannya, Kerusakan jalan tidak beraspal, pemeliharaan Rutin serta Pemeliharaan periodik Permukaan Jalan tidak Beraspal
182	2.01-1. 95 . 00326	Tanah dan Batuan-Batuan	Departemen PU	1977	Merupakan bahan kursus yang membahas antara lain mengenai definisi tanah dan batuan, karakteristiknya, sifat-sifatnya, dan berbagai macam klasifikasinya serta cara untuk mendapatkan bahan/campuran bahan yang baik.

183	2.01-1. 95 . 00336	Hukum Anggaran Negara	H. Bohari, S.H., M.S.	1995	Membahas keuangan negara dari sudut hukum khususnya hukum anggaran yang mencakup siklus anggaran negara mulai dari rancangan anggaran, pembahasan anggaran di DPR sampai menjadi UU, pengurusan anggaran, perhitungan dan pertanggungjawaban anggaran negara.
184	2.01-1. 95 . 00373	Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara	Indroharto, S.H.	1994	Dasar-dasar pengertian Hukum Tata Usaha Negara serta bagaimana jalannya proses atau cara beracara di hadapan Pengadilan Tata Usaha Negara.
185	2.01-1. 95 . 00374	Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara	Indroharto, S.H.	1994	Dasar-dasar pengertian Hukum Tata Usaha Negara serta bagaimana jalannya proses atau cara beracara di hadapan Pengadilan Tata Usaha Negara.
186	2.01-1. 95 . 00376	Aspek Yuridis dalam Leasing	Drs. Amin Widjaja Tunggal, Ak., MBA. Dan Drs. Arif Djohan Tunggal, S.H.	1994	Aspek-aspek yuridis dalam <i>leasing</i> sebagai usulan agar dibuat peraturan tentang <i>leasing</i> , agar terdapat peraturan hukum secara khusus dalam <i>leasing</i> .
187	2.01-1. 96 . 00088	Kriminologi	Topo Santoso, S.H., M.H. dan Eva Achjani Zulfa, S.H.	2001	Menjelaskan mengenai faktor-faktor pemicu dari perkembangan ilmu kriminologi, obyek studi kriminologi, dasar dan teori-teori kriminologi, serta penjelasannya dari perspektif psikologis dan sosiologis dan disiplin ilmu lainnya.
188	2.01-1. 96 . 00368	Mencegah Pejabat Tata Usaha Negara Sebagai Tergugat Dalam PTUN (Analisis Hukum dan Peraturan Perundang-undangan)	Paulus JJ. Sipayung, S.H., M.H.	1994	Permasalahan-permasalahan pokok untuk mengupayakan pencegahan pejabat sebagai tergugat dalam Peradilan Tata Usaha Negara
189	2.01-1. 97 . 00053	Obligasi dalam Perspektif Hukum Indonesia	A. Setiadi, S.H.	1996	Membahas obligasi yang meliputi aspek khususnya yang menyangkut aspek hukum dalam suatu penerbitan obligasi terutama berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal.
190	2.01-1. 97 . 00060	Etika Politik, Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern	Franz Magnis-Suseno	1994	Membahas masalah-masalah mendasar, legitimasi hukum dan negara, positivisme hukum, hak-hak asasi manusia dan kebebasan suara hati, wewenang negara dan batas-batasnya, demokrasi, tanggung jawab sosial negara, hal ideologi, bersamaan dengan fikiran tokoh-tokoh filsafat politik seperti Aquinas, Hobbes, Locke, Rousseau, Hegel, dan Marx.
191	2.01-1. 97 . 00066	Hukum Dalam Perkembangan Bioteknologi	Drs. Muhammad Djumhana, S.H.	1995	Membahas masalah bagaimana hukum secara dinamis dapat mengikuti perkembangan bioteknologi

192	2.01-1. 97 . 00099	Hukum Bangunan, Dasar-Dasar Hukum dalam Proyek dan Sumber Daya Manusia	Djumialdji, S.H.	1996	Memberikan panduan hukum dalam pelaksanaan pembangunan yang memuat antara lain perihal mengenai perjanjian pemborongan, peserta dalam perjanjian pemborongan, tenaga kerja dalam proyek, penyaringan pemborong, cara memborongkan proyek, jaminan dalam perjanjian pemborongan, pengadaan tanah bagi proyek, serta produksi dalam negeri.
193	2.01-1. 97 . 00164	Komputer dan Hukum	David I. Bainbridge	1993	Menguraikan pembahasan hubungan keterkaitan antara hukum dan teknologi komputer, menjelaskan implikasi-implikasi hukum dari pemilikan, pengembangan dan penggunaan peralatan komputer dan perangkat lunak komputer serta menganalisis dampak yang ditimbulkan teknologi komputer terhadap bidang hukum. Pembahasan dipusatkan pada landasan-landasan teoritis dan bidang-bidang hukum terkait yang memiliki relevansi langsung dengan organisasi-organisasi dan perorangan yang bersangkutan-paut dengan komputer.
194	2.01-2. 98 . 00008	GATT, WTO, dan Hasil Uruguay Round	H.S. Kartadjoemena	1997	Mengupas mengenai GATT, WTO dan berbagai hasil Putaran Uruguay secara mendalam dan menonjolkan aspek teknis dan operasional dari berbagai ketentuan yang ada. Menyajikan pula berbagai proses negosiasi dan pertemuan berbagai kepentingan dalam negara anggota.
195	2.02-2. 98 . 00008	GATT, WTO, dan Hasil Uruguay Round	H.S. Kartadjoemena	1997	Mengupas mengenai GATT, WTO dan berbagai hasil Putaran Uruguay secara mendalam dan menonjolkan aspek teknis dan operasional dari berbagai ketentuan yang ada. Menyajikan pula berbagai proses negosiasi dan pertemuan berbagai kepentingan dalam negara anggota.
196	2.01-1. 98 . 00056	Sertifikasi ISO 14001, Sistem Manajemen Lingkungan	W. Lee Kuhre	1996	Menyajikan keseluruhan proses sertifikasi ISO 14001, mulai dari penilaian awal sampai ke audit eksternal, menunjukkan cara memperoleh sertifikasi dengan biaya dan gangguan terhadap bisnis sekecil mungkin, serta menunjukkan bahaya untuk menghindari kegagalan apabila harus menghadapi audit lingkungan. Memberikan cara untuk menganalisis dampak lingkungan bisnis, membentuk kesadaran lingkungan, menetapkan kebijakan untuk melacak dan meminimasi limbah, mengelola staf dan vendor, mendokumentasikan usaha yang telah dilakukan baik secara internal maupun eksternal, membentuk rencana gawat darurat yang efektif, dan mengakses database dan sumberdaya lain.

197	2.02-2. 98 . 00121	Politik Ekonomi Pertanahan dan Struktur Perpajakan atas Tanah	Chaizi Nasucha	1995	Membahas masalah ekonomi tanah yang difokuskan pada ruang lingkup interaksi antara sistem pertanahan dan perpajakan atas tanah di Indonesia serta memuat paket dari indikator ekonomi tanah, kebijaksanaan pertanahan dan perpajakan atas tanah.
198	2.01-2. 98 . 00121	Politik Ekonomi Pertanahan dan Struktur Perpajakan atas Tanah	Chaizi Nasucha	1995	Membahas masalah ekonomi tanah yang difokuskan pada ruang lingkup interaksi antara sistem pertanahan dan perpajakan atas tanah di Indonesia serta memuat paket dari indikator ekonomi tanah, kebijaksanaan pertanahan dan perpajakan atas tanah.
199	2.01-1. 98 . 00330	Hukum Perkawinan Nasional	Drs. Sudarsono, S.H.	1994	Penjabaran Titik Remil beserta seperangkat ketentuan hukum atau perundang-undangan perkawinan nasional.
200	2.01-2. 98 . 00332	Studi Kasus Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dan Praktek di Pengadilan Agama Pengadilan Negeri	Mohd. Idris Ramulyo, S.H., M.H.	1994	Menjelaskan mengenai garis-garis pokok hukum kewarisan, sebab-sebab dapat mewarisi, sistem kewarisan bilateral, sistem kewarisan ahlu'ssunah (Patrilinial), perbandingan pembagian warisan menurut ajaran Syafi'i (patrilinial), Hazairin (Bilateral), dan KUH Perdata (BW), tentang wasiat, hutang, hibah, beberapa kasus khusus, serta beberapa kasus dari pengadilan agama.
201	2.02-2. 99 . 00014	Unit Swadana dan Tata Cara Pengelolaan Keuangannya	-	1992	Mencakup: UU APBN Tahun Anggaran 1992/1993, UU Dana Pensiun, pedoman pemasyarakatan budaya kerja, tanya-jawab program budaya kerja.
202	2.01-2. 99 . 00014	Unit Swadana dan Tata Cara Pengelolaan Keuangannya	-	1992	Mencakup: UU APBN Tahun Anggaran 1992/1993, UU Dana Pensiun, pedoman pemasyarakatan budaya kerja, tanya-jawab program budaya kerja.
203	2.01-1. 99 . 00057	Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama: Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia	DR. Sri Gambir Melati Hatta, S.H.	1999	Merupakan karya tulis yang mengkombinasikan perjanjian sewa dan beli disertai dengan penelitian terhadap sejumlah kontrak yang berlaku di Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Indonesia lainnya serta penelitian putusan pengadilan di Indonesia dilengkapi dengan studi dan penelitian banding di beberapa negara. Cakupan penjelasan meliputi beli sewa menurut sistem hukum "Civil Law" berbeda dengan "Common Law", perjanjian beli sewa sebagai perjanjian tak bernama, perkembangan perjanjian beli sewa dalam praktek di Indonesia, dan sikap Mahkamah Agung Indonesia mengenai perjanjian beli sewa.